

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan mengenai kualitas laporan keuangan kini semakin hangat untuk diperbincangkan, banyak kasus-kasus buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia masih menjadi isu hangat yang perlu dikaji lebih dalam. Hal ini merupakan bukti dari kurangnya pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan buruknya sistem pengendalian internal, sehingga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Permasalahan ini dibuktikan dengan diperolehnya opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) terhadap laporan keuangan pemerintah setiap tahunnya. Rendahnya kualitas laporan keuangan, secara umum disebabkan penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi standar akuntansi pemerintahan, dan penyelenggaraan sistem pengendalian internal yang belum memadai (Udiyanti, 2014).

Adapun beberapa hasil opini audit atas laporan keuangan Kementerian Republik Indonesia, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Daftar Opini Audit BPK atas LKPP Kementerian Keuangan RI

TAHUN	OPINI BPK
2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: <http://www.bpk.go.id/news/>

Tabel diatas menunjukkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP setiap tahunnya sampai dengan periode 2015. Ketua BPK Periode 2014-2016 **Hary Azhar Azis** menyampaikan, bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi adalah lemahnya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada program aplikasi berbasis akrual, sehingga tidak sesuai dengan batas waktu penerapan yang telah ditetapkan, dan belum sesuai konsep serta kerangka dari indikatornya. Selain Standar Akuntansi Pemerintah, faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Sistem Pengendalian Internal. Sistem Pengendalian Internal harus dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur untuk menjadi penunjang keberhasilan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dimasa yang akan datang serta mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Kualitas laporan keuangan tidak hanya diukur dari kesesuaian dengan SAP saja, tetapi juga dari sistem pengendalian internalnya. Untuk itu, pemerintah daerah harus mendesain, mengoperasikan dan memelihara sistem pengendalian intern yang baik dalam rangka menghasilkan informasi keuangan yang andal (Susilawati, 2014). Melalui

penguatan Sistem Pengendalian Internal, diharapkan upaya perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan pusat lebih dipacu agar kedepannya dapat memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebab laporan keuangan yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berarti laporan tersebut dapat dipercaya sebagai alat pengambil keputusan oleh para pemakai laporan keuangan. Selain itu penerapan Sistem Pengendalian Internal dapat mencegah adanya suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektifitas, dan dapat mencegah kerugian Negara.

Berdasarkan hasil Syamsuar (2013) bahwa dengan diterapkannya sistem pengendalian intern akan meningkatkan keandalan laporan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Susilawati, 2014) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat.

Pengelolaan keuangan publik yang buruk akan memberikan kesempatan untuk melakukan penyimpangan dan kesalahan dalam mengelola keuangan tersebut. Dapat pula menimbulkan kecurangan yang menyebabkan terjadinya korupsi. Jika terus dilanjutkan, masyarakat akan menghadapi konsekuensi, biaya transaksi tinggi dan buruknya pelayanan publik. Hal ini dapat menjadi penyebab hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Warongan, 2014).

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah pusat masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang diisyaratkan. Mengingat bahwa karakteristik kualitatif merupakan unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagai dasar pengambilan keputusan. Dari latar belakang masalah tersebut maka penulis memberi judul skripsi ini adalah **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI periode 2014-2016)”**.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.
2. Bagaimana Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.
3. Bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

3. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Praktisi
Sebagai bahan acuan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada kinerja keuangan dalam penyusunan laporan keuangan agar semakin baik untuk perkembangan kedepannya.
2. Bagi Akademisi
Bagi Kalangan Akademisi dan pihak-pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian sejenis, penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dalam ilmu akuntansi khususnya yang membahas standar akuntansi, sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan.